

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaannya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, keakuratan informasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian baik oleh pelaku bisnisnya maupun oleh masyarakat dan pemerintah. Penerapan teknologi informasi yang diterapkan di perusahaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan. Penggunaan teknologi informasi pada suatu perusahaan akan membawa keuntungan bagi perusahaan itu sendiri (Sihotang, 2015).

Tata kelola teknologi informasi adalah bagian yang terintegrasi dari pengelolaan organisasi yang mencakup kepemimpinan, struktur serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tata kelola teknologi informasi memiliki cakupan yang lebih luas dan berfokus pada kinerja dan transformasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang, baik dari sudut internal maupun eksternal (Surendro, 2009).

Daya saing suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada tata kelola TI, karena tata kelola TI yang baik memungkinkan suatu perusahaan mampu mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuannya. Kecepatan organisasi dalam menerapkan tata kelola IT dapat meningkatkan kepemimpinan dan citra organisasi di pasar. Kesuksesan tata kelola organisasi atau perusahaan tergantung terhadap seberapa jauh tata kelola IT dilakukan (Octaria, 2017).

Penyebab utama dari kegagalan suatu organisasi dalam persaingan adalah kurangnya analisis dan tata kelola yang baik terhadap teknologi informasi di organisasi tersebut. Tanpa adanya tata kelola IT yang baik, maka pengembangan infrastruktur IT yang hendak dilakukan akan berjalan tanpa arah, sehingga pengembangan infrastruktur IT tidak maksimal bagi organisasi dan menyebabkan melemahnya posisi kompetisi di pasaran (Octaria, 2017).

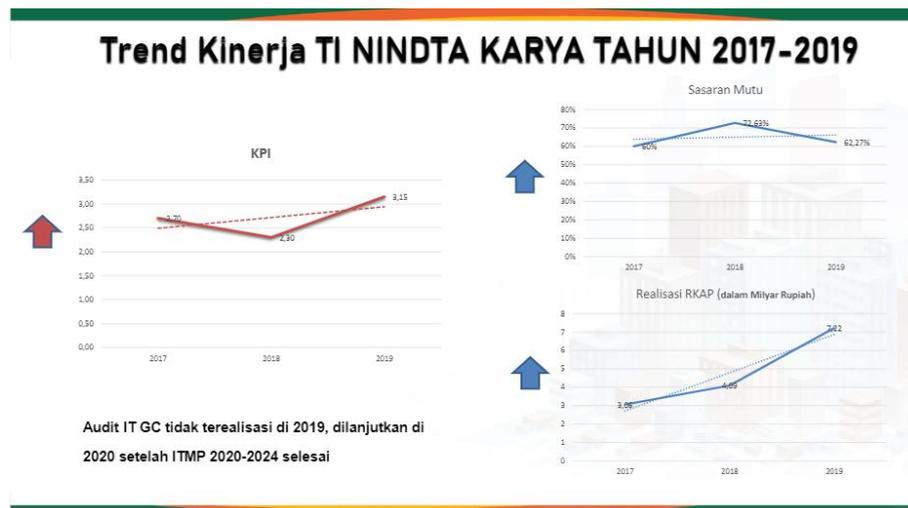
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-03/MBU/2018 menyatakan bahwa “dalam rangka meningkatkan koordinasi antara kementerian badan usaha milik negara, diperlukan pemanfaatan sarana pengelolaan teknologi informasi yang lebih baik (good governance)”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknologi informasi. Dan oleh karena itu seluruh perusahaan BUMN harus memenuhi panduan tentang penyusunan

pengelolaan teknologi informasi, sama halnya dengan PT.Nindya Karya. Pada PT.Nindya Karya sudah menggunakan *framework* ISO untuk referensi prosedur dalam penyusunan tata kelola teknologi informasi untuk referensi prosedur. Pada kesempatan kali ini peneliti mereferensikan COBIT 2019 dan COBIT 2019 *Implementation* sebagai *bestpractice* Tata Kelola TI untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

COBIT 2019 adalah kerangka kerja untuk tata kelola, manajemen informasi dan teknologi perusahaan untuk mencapai tujuan. COBIT 2019 juga memperkenalkan terminologi baru dari faktor desain, perubahan pada prinsip-prinsipnya, pada struktur, dan analisis model yang dapat meningkatkan nilai dari teknologi informasi (ISACA, 2018). Sedangkan COBIT 2019 *Implementation* adalah salah satu produk yang dikeluarkan untuk pengimplementasian tata kelola yang bertujuan untuk mengoptimalkan informasi dan teknologi sistem tata kelola berdasarkan dengan *life cycle* yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (ISACA, 2018).

PT Nindya Karya (Persero) adalah sebuah perusahaan konstruksi dengan kepemilikan saham dipegang oleh Negara Republik Indonesia dan PT PPA (Persero). Selain menjalankan usaha bidang konstruksi, Perseroan juga menjalankan usaha dalam bidang Engineering, Procurement, Construction (EPC) dan investasi. Sebagai perusahaan konstruksi, Nindya telah membangun berbagai macam proyek bangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek itu meliputi pembangunan irigasi dan bendungan, dermaga, bangunan industri dan EPC, bandara, rumah sakit, apartemen dan hotel, bangunan komersial, jalan raya dan tol, jalan layang dan jembatan, bangunan olahraga, bangunan pendidikan dan berbagai bangunan komersial lainnya (Nindya Karya, n.d.).

Tata Kelola dan proses kebijakan operasional pada saat ini di PT Nindya Karya sudah ada dan telah dijalankan, akan tetapi belum terealisasikan secara maksimal. Artinya, sudah ada proses kebijakan operasional tetapi belum spesifik diterapkan oleh PT Nindya Karya. Dan sudah ada divisi yang membahas tentang Tata Kelola, sehingga perusahaan ini sudah selangkah lebih maju dan perusahaan yang dipilih sudah tepat. Berikut adalah hasil kinerja tata kelola pada tahun 2017-2019:



Gambar I.1 Trend Kinerja TI PT.Nindya Karya 2017-2019

Berdasarkan gambar I-1, perbandingan 3 tahun kebelakang pada proses tata kelola pada tahun 2017 KPI berada pada angka 2,70 , pada tahun 2018 proses KPI mengalami penurunan yang sangat drastis pada angka 2,30 dan pada tahun 2019 proses KPI mengalami kenaikan pada angka 3,15, tetapi walaupun mengalami kenaikan yang signifikan IT tata Kelola tidak terealisasi di tahun 2019 dan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2020 setelah ITMP 2020-2024 selesai. Karena IT masih bergabung menjadi satu department dengan pengembangan, sistem dan risk jadi KPI di PT.Nindya Karya masih digabung.

Berdasarkan uraian diatas COBIT 2019 merupakan standar terbaru untuk proses tata kelola yang mampu membantu suatu perusahaan untuk mengelola, mengembangkan dan membantu proses tata kelola dan manajemen teknologi informasi di perusahaan PT. Nindya Karya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat rekomendasi tata kelola TI berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 yang berfokus pada proses domain APO10 Managed Vendors yang mengelola produk dan layanan terkait pemilihan vendor, manajemen hubungan, manajemen kontrak dan rantai pasok untuk efektivitas dan kepatuhan perusahaan dan MEA01 *Managed Performance and Conformance Monitoring* yang mengumpulkan, memvalidasi, dan evaluasi serta memberikan laporan yang sistematis dan tepat waktu sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang diharapkan dapat memberikan referensi untuk PT.Nindya Karya dan pengimplementasian Tata Kelola Teknologi Informasi Pengendalian Operasional pada proses Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga serta proses Pengelolaan Monitor dan Evaluasi Kinerja TI. Penelitian yang dilakukan akan melalui beberapa tahapan mulai dari menganalisis kebutuhan perusahaan, sampai dengan

pemberian rekomendasi yang mengacu kepada *best practice*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dituliskan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada Proposal Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana kondisi penerapan Tata Kelola TI pada proses pengelolaan layanan pihak ketiga dan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI pada PT. Nindya Karya terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-03/MBU/2018 dan best practice COBIT 2019?
2. Bagaimana analisis dan desain penerapan Tata Kelola TI pada proses pengelolaan layanan pihak ketiga dan Pengelolaan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI pada PT. Nindya Karya dan kesenjangan nya terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-03/MBU/2018 dan best practice COBIT 2019?
3. Bagaimana usulan rekomendasi Tata Kelola TI pada proses pengelolaan layanan pihak ketiga dan Pengelolaan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI pada PT. Nindya Karya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dituliskan, maka tujuan dari penelitian pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Memahami kondisi penerapan Tata Kelola TI BUMN pada proses Layanan Pihak Ketiga serta Pengelolaan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI di PT. Nindya Karya (Persero).
2. Menghasilkan analisis dan desain penerapan Tata Kelola TI BUMN proses Layanan Pihak Ketiga serta Pengelolaan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI di PT. Nindya Karya (Persero).
3. Menghasilkan rekomendasi Tata Kelola TI BUMN pada proses Layanan Pihak Ketiga serta Pengelolaan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI di PT. Nindya Karya (Persero).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dituliskan, manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi penerapan pengelolaan layanan pihak ketiga dan Pengelolaan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI di PT. Nindya Karya.
2. Memberikan rekomendasi dari penerapan pengelolaan layanan pihak ketiga dan Pengelolaan Data Monitor dan Evaluasi Kinerja TI di PT. Nindya Karya.
3. Membantu PT. Nindya Karya untuk memenuhi regulasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2018 dan memenuhi *process practice* terkait pada COBIT 2019.

1.5 Ruang Lingkup

Terdapat batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup penelitian dalam melakukan penelitian mengenai kebijakan operasional pada proses pengelolaan layanan pihak ketiga dan pengelolaan operasional, yaitu :

1. Penelitian ini akan menggunakan PERMEN terbau Nomor : PER-03/MBU/2018 pada proses Layanan Pihak Ketiga dan Monitor & Evaluasi Kinerja TI Serta COBIT 2019 dimana Layanan pihak ketiga memiliki proses APO10 yaitu *Managed Vendors*, yang dimaksud *Managed Vendors* didalam APO10 adalah mengelola produk dan layanan terkait pemilihan vendor, manajemen hubungan, manajemen kontrak dan rantai pasok untuk efektivitas dan kepatuhan perusahaan, Kemudian pada proses Monitor & Evaluasi Kinerja TI memiliki proses MEA01 yaitu *Managed Performance and Conformance Monitoring* yang mengumpulkan, memvalidasi, dan evaluasi serta memberikan laporan yang sistematis dan tepat waktu sesuai dengan tujuan perusahaan sebagai panduan *process practice*.
2. Penelitian ini hanya akan membahas sampai fase 5 pada COBIT 2019 *Implementation*